PERAN DATA KEPENDUDUKAN SEBAGAI BASIS GERAKAN LISU MASSIKOLA DALAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aulia Nurul Fitriah
NPP 33.0917
Program Studi Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: aulianurulfitriah07@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd
Email: udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The utilization of population data as a basis for implementing educational programs, particularly the Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) Program in Bone Regency, has not yet been optimal. The main issues include discrepancies between administrative data and field conditions, delays in data updating, and weak inter-agency coordination. These conditions affect the accuracy of program targeting.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the role of population data as the basis of the Gerakan Lisu Massikola Program in improving the Human Development Index in Bone Regency, South Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study employs a descriptive qualitative method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving seven informants. Data analysis was conducted using NVivo through coding, thematic categorization, and conclusion drawing, based on the Role Theory proposed by Biddle and Thomas (1966).* ***Result:*** *The results show that population data has been utilized as an initial basis for determining program targets; however, it has not been optimally integrated. The main obstacles include low data accuracy and timeliness, weak inter- agency coordination, limited human resource capacity, low public awareness, and weak sanction mechanisms.* ***Conclusion:*** *Therefore, efforts are needed to strengthen data updating systems, cross-sectoral data integration, human resource capacity building, as well as data socialization and control.*
Keywords: *Data Integration, Gerakan Lisu Massikola, Role of Population Data*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pelaksanaan program pendidikan, khususnya Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) di Kabupaten Bone, masih belum optimal. Permasalahan yang muncul meliputi ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, keterlambatan pemutakhiran data, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini berdampak pada kurang tepatnya penentuan sasaran program. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran data kependudukan sebagai basis Gerakan Lisu Massikola dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo melalui

proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan Teori Peran Biddle dan Thomas (1966). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kependudukan telah digunakan sebagai basis awal penentuan sasaran program, namun belum terintegrasi secara optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya akurasi data, lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya mekanisme sanksi. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemutakhiran data, integrasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sosialisasi dan pengendalian data.
Kata kunci: Gerakan Lisu Massikola, Integrasi Data, Peran Data Kependudukan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia menjadi isu strategis global yang ditekankan oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui konsep pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan capaian pembangunan manusia berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan (Yin et al., 2023). Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan keluaran dan hasil pembangunan yang efektif (Siswidiyanto & Sahputri, 2023). Di tingkat lokal, optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan memegang peranan vital dalam mendorong kinerja pemerintah untuk memberikan pelayanan prima (Rahadi et al., 2020). Administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi merupakan fondasi penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif (Runtu, 2021). Selain itu, dinamika kependudukan yang cepat, seperti yang terjadi di berbagai daerah perbatasan dan wilayah strategis, membutuhkan perencanaan yang sangat matang (Hutasoit, 2023). Di Indonesia, fenomena bonus demografi harus direspons dengan kebijakan kependudukan dan pendidikan yang tepat sasaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal (Melo et al., 2024).

Kondisi di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Bone, menunjukkan peningkatan IPM secara bertahap, namun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan capaian pembangunan manusia. Hal ini sejalan dengan Siswidiyanto dan Sahputri (2023) yang menegaskan bahwa capaian pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam menghasilkan keluaran dan hasil pembangunan yang efektif. Mengatasi ketimpangan ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk merancang kebijakan komprehensif dan adaptif yang berorientasi pada pembangunan manusia jangka panjang (Rahmah et al., 2025). Kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan desentralisasi sangat menentukan keberhasilan *output* dan *outcome* pembangunan (Siswidiyanto & Sahputri, 2023), termasuk kemampuan manajerial aparatur dan sumber daya manusia di dalamnya (Sedarmayanti, 2017). Lebih dari itu, karakteristik finansial daerah serta optimalisasi pendapatan seperti pajak daerah juga memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap ruang fiskal untuk mendanai sektor-sektor pembentuk IPM, termasuk pendidikan (Saputra et al., 2018; Saragih, 2018)

Indikator pendidikan Kabupaten Bone menunjukkan HLS meningkat dari 12,88 tahun pada 2020 menjadi 13,02 tahun pada 2024, tetapi masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan.

Rendahnya RLS menunjukkan sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan menengah. Permasalahan utama lainnya adalah tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai 17.771 anak pada tahun 2021 (BPS Kabupaten Bone, 2024). Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kabupaten Bone meluncurkan Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) untuk meningkatkan partisipasi pendidikan melalui penelusuran, pendataan, dan pengembalian anak putus sekolah ke pendidikan formal maupun nonformal. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang saling berkaitan dalam mendorong pembangunan daerah (Khairina & Wijaya, 2023). Keberhasilan program lokal seperti ini diyakini menjadi kunci utama dalam mendongkrak capaian indeks pembangunan manusia secara nasional (Khairul Muluk & Wahyudi, 2022). Pada tahun 2021 sebanyak 8.646 siswa kembali bersekolah dan meningkat menjadi 10.513 siswa pada tahun 2022 (Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2024).

Jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Bone terus menurun dari 17.771 anak pada tahun 2021 menjadi 12.771 anak pada tahun 2024. Keberhasilan tersebut didukung oleh pemanfaatan data kependudukan yang valid melalui NIK, akta kelahiran, dan kartu keluarga untuk mengidentifikasi anak usia sekolah secara lebih akurat (Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2024). Meskipun demikian, integrasi administrasi kependudukan dengan Gerlimas masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen kependudukan anak putus sekolah, belum optimalnya koordinasi antara Disdukcapil dan Dinas Pendidikan, tumpang tindih data, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan dokumen kependudukan. Nasional, pemerintah telah mendorong penguatan tertib administrasi kependudukan melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi (Fadhil & Ilham, 2019). Penelitian sebelumnya umumnya membahas implementasi Gerlimas dan pelayanan administrasi kependudukan secara terpisah. Kajian mengenai peran data kependudukan sebagai dasar kebijakan penanganan anak putus sekolah dalam meningkatkan IPM masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian tentang "Peran Data Kependudukan sebagai Basis Gerakan Lisu Massikola dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan" dinilai relevan untuk memberikan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan sebagai basis pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone. Meskipun IPM Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari 68,46 pada tahun 2020 menjadi 70,81 pada tahun 2024, sektor pendidikan masih menjadi kelemahan utama, khususnya tingginya angka anak putus sekolah dan rendahnya rata-rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Bone melalui program Gerlimas berupaya mengembalikan anak putus sekolah agar kembali memperoleh akses pendidikan formal maupun nonformal. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian data kependudukan dengan kondisi lapangan. Persoalan administratif ini sering kali terjadi pada pelaksanaan pelayanan publik di daerah, sehingga evaluasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan menjadi sebuah keharusan (Ahmad, 2019). Implementasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis pemanfaatan data yang akurat masih menghadapi berbagai kendala dalam integrasi dan pemanfaatan data antarinstansi (Runtu, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya telah

membahas pentingnya data kependudukan dalam pelayanan publik dan akses pendidikan, namun masih memiliki keterbatasan ruang lingkup kajian. Ketepatan sasaran sangat bergantung pada integrasi data lintas sektor. Sebagaimana diketahui, sinkronisasi data kependudukan dengan sistem pendidikan (seperti integrasi Dapodik) masih menjadi tantangan utama di banyak daerah (Kasbijanto et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa berbagi informasi (*information sharing*) dalam lingkungan pemerintahan harus menyatukan tidak hanya dimensi teknis tetapi juga dimensi sosial kelembagaan (Gil-Garcia et al., 2009). Upaya mengintegrasikan pemanfaatan data untuk mewujudkan *Single Identity Number* terus didorong, namun implementasinya di daerah belum merata (Rasdy Gery Runtu, 2021). Pada sisi lain, rekayasa dan pengembangan sistem informasi demografi mutlak diperlukan agar pendataan IPM berbasis daerah menjadi akurat (Sukur & Listiyono, 2014).

Kajian terdahulu juga menemukan bahwa penanganan anak putus sekolah sangat bergantung pada seberapa kuat koordinasi lintas instansi berjalan di lapangan (Febriana & Rangkuti, 2023). Namun, proses ini juga ditantang oleh tingkat literasi digital aparatur dan masyarakat, yang urgensinya semakin meningkat seiring digitalisasi pelayanan publik (Giroth et al., 2024). Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan peran data kependudukan dengan strategi penanganan anak putus sekolah dalam mendukung peningkatan IPM, khususnya pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bone. Penelitian terdahulu cenderung membahas data kependudukan sebatas pelayanan publik, administrasi dokumen, atau perencanaan pembangunan secara umum, sedangkan penelitian mengenai Gerlimas lebih banyak berfokus pada implementasi program tanpa mengkaji kualitas integrasi data kependudukan sebagai fondasi utama efektivitas program. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana data kependudukan digunakan sebagai basis operasional dalam penelusuran, pendataan, dan pengembalian anak putus sekolah melalui Gerakan Lisu Massikola guna meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bone.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola di Kabupaten Bone masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, keterlambatan pemutakhiran data, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih banyaknya anak putus sekolah yang belum teridentifikasi secara akurat. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas program pendidikan dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bone. Di sisi lain, pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga keberhasilan penanganan anak putus sekolah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pemerintah daerah. Penelitian ini juga penting karena masih terbatasnya kajian yang membahas keterkaitan antara data kependudukan dengan implementasi program pendidikan daerah secara komprehensif, khususnya dalam konteks Gerakan Lisu Massikola.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh dasar empiris mengenai efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung program pendidikan. Akibatnya, proses penentuan sasaran program berpotensi tidak tepat, pendataan anak putus sekolah dapat terus mengalami ketidaksinkronan, serta kebijakan yang diambil kurang mampu menjawab kondisi riil di lapangan. Selain itu, lemahnya integrasi data antarinstansi dapat menyebabkan program penanganan anak putus sekolah berjalan kurang optimal dan berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas pendidikan serta capaian IPM di Kabupaten Bone. Selain dukungan pemerintah, keberhasilan pembangunan manusia juga memerlukan keterlibatan aktif

masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal (Darwin, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat integrasi data kependudukan dan kebijakan pendidikan guna mendukung pembangunan manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas pemanfaatan data kependudukan, administrasi kependudukan, pelayanan publik, akses pendidikan, serta pembangunan manusia. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai data kependudukan memiliki variasi fokus, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam melihat peran data sebagai dasar perumusan kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2019) mengkaji pemanfaatan data kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pembaruan data sangat menentukan efektivitas perencanaan program pemerintah berbasis penduduk. Penelitian ini berfokus pada pelayanan publik secara umum dan belum membahas sektor pendidikan secara spesifik.

Selanjutnya, Kasbijanto et al. (2025) meneliti integrasi data pendidikan melalui sinkronisasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem penerimaan peserta didik baru secara daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi dan pemanfaatan data yang akurat berperan penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran layanan pendidikan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada hambatan administratif individu dan belum mengkaji integrasi data kependudukan dalam program penanganan anak putus sekolah secara terstruktur. Secara teoritis, pelaksanaan administrasi dan kebijakan ini dapat ditelaah menggunakan kacamata ilmu pemerintahan baru (Kybernology) yang menitikberatkan pada seni memerintah dan mengatur masyarakat (Ndraha, 2011; wahyu aji, andi haerani, fadhel robi, gita wulandari, 2017)

Kemudian, (Sukur & Listiyono, 2014) meneliti pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian tersebut menemukan bahwa rekayasa sistem informasi demografi menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan penghitungan IPM. Namun penelitian ini masih bersifat umum dan belum mengarah pada implementasi program pendidikan tertentu seperti Gerakan Lisu Massikola. Penelitian lain dilakukan oleh (Sunardi et al., 2022 menyebutkan Keberhasilan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas data kependudukan dalam konteks pelayanan publik, akses pendidikan, dan perencanaan pembangunan daerah. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana data kependudukan digunakan sebagai basis operasional dalam Gerakan Lisu Massikola untuk mendukung penanganan anak putus sekolah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian (research gap) tersebut dengan menelaah integrasi data kependudukan dan program pendidikan secara lebih komprehensif.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas administrasi kependudukan atau program pendidikan secara terpisah, tetapi mengintegrasikan keduanya dalam konteks kebijakan daerah melalui Gerakan Lisu Massikola

(Gerlimas) di Kabupaten Bone. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ahmad, 2019) lebih menitikberatkan pada pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik secara umum membahas kepemilikan dokumen kependudukan terhadap akses pendidikan dasar, sedangkan (Sukur & Listiyono, 2014) meneliti data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah secara makro. Adapun penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana data kependudukan digunakan sebagai basis operasional dalam penelusuran, pendataan, dan pengembalian anak putus sekolah melalui program Gerlimas untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada dimensi pendidikan di Kabupaten Bone. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan perspektif baru mengenai integrasi data kependudukan dengan kebijakan pendidikan daerah yang belum dikaji secara komprehensif pada penelitian sebelumnya.

Kebaruan penelitian ini juga terlihat dari aspek teori, metode, dan karakteristik objek penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual Teori Peran (Role Theory) dari (Biddle, 1986), yang membantu memahami bagaimana ekspektasi, norma, dan kinerja aktor-aktor birokrasi berinteraksi dalam pelaksanaan kebijakan. Teori ini menitikberatkan pada dimensi harapan (expectation), norma (norm), perilaku (performance), evaluasi (evaluation), dan sanksi (sanction) dalam menganalisis peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pendidikan dalam mendukung efektivitas Gerakan Lisu Massikola. Lebih jauh lagi, identitas status individu (misalnya sebagai "anak sekolah" atau "putus sekolah") dan data kependudukan mereka tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga memengaruhi aspek sosial psikologis masyarakat (Thoits, 2013). Selain itu, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data berbasis aplikasi NVivo melalui proses coding, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan, sehingga memberikan pendekatan analisis yang lebih sistematis dan mendalam dibanding penelitian sebelumnya yang sebagian besar hanya menggunakan pendekatan kualitatif umum. Karakteristik objek penelitian juga menjadi unsur kebaruan karena penelitian ini berfokus pada Gerakan Lisu Massikola sebagai program khas Pemerintah Kabupaten Bone dalam penanganan anak putus sekolah berbasis data kependudukan untuk meningkatkan IPM daerah.

1.6. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran data kependudukan sebagai basis Gerakan Lisu Massikola dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara natural. Pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran (mixed methods) memiliki desain rancangan yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis mendalam atas dinamika yang terjadi (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran data kependudukan sebagai basis Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone, khususnya pada dimensi pendidikan. Pendekatan kualitatif dinilai tepat karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual melalui penggalian informasi dari para aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Penelitian ini juga menggunakan Teori Peran (Biddle, 1986) untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan koordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar kebijakan pendidikan.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi faktual di lapangan, termasuk hambatan integrasi data dan strategi optimalisasi program. Analisis data interaktif juga didukung oleh pedoman metodologi penelitian bisnis dan pendidikan kontemporer agar menghasilkan temuan yang reliabel (Widodo & Utami, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dalam penelitian sosial dan pendidikan, metodologi yang tepat digunakan untuk menggali makna dari perilaku partisipan (Sugiyono, 2013). Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan data kependudukan maupun pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri dari unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, serta pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan dan pendataan anak putus sekolah. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone karena memiliki kewenangan dan pemahaman terkait pengelolaan, pemutakhiran, serta integrasi data kependudukan yang menjadi dasar penentuan sasaran program Gerlimas. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan dipilih karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan program penanganan anak putus sekolah. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara administrasi kependudukan dan kebijakan pendidikan daerah.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh. Selain itu, dilakukan member check kepada informan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014). Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan aplikasi NVivo untuk membantu proses pengkodean, kategorisasi tema, dan visualisasi data penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai lokasi utama penelitian. Proses penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tiga bulan pada tahun 2025 hingga 2026 yang meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran aktual mengenai pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung efektivitas Gerakan Lisu Massikola dalam peningkatan IPM Kabupaten Bone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama pelaksanaan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Hasil penelitian dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo melalui proses coding berdasarkan Teori Peran Biddle dan Thomas (1966) yang mencakup lima dimensi utama, yaitu harapan (expectation), norma (norm), wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation), dan sanksi (sanction). Kelima dimensi tersebut digunakan untuk memahami bagaimana data kependudukan yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone berperan dalam mendukung Program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas).

Gambar 1.
Word cloud Transkrip Nvivo



Sumber: Hasil olahan data NVivo peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 1, visualisasi word cloud menunjukkan kata "data", "program", "anak", "sekolah", dan "pendidikan" paling dominan. Hal ini menandakan pembahasan informan berfokus pada keterkaitan data kependudukan dengan pelaksanaan program pendidikan untuk menjangkau anak usia sekolah. Selain itu, munculnya kata "belum", "kendala", dan "pelaksanaan" menunjukkan masih adanya hambatan teknis, koordinasi antarinstansi, dan kelengkapan data dalam implementasi program. Dominasi kata "peran" dan "data" memperlihatkan bahwa data kependudukan tidak hanya menjadi output administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan Gerlimas.

3.1 Peran Data Kependudukan dalam Mendukung Efektivitas Gerakan Lisu Massikola di Kabupaten Bone

3.1.1 Harapan (Expectation)

Dimensi harapan (expectation) digunakan untuk melihat bagaimana pemangku kepentingan memandang peran ideal data kependudukan dalam mendukung pelaksanaan Program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) di Kabupaten Bone. Data kependudukan dipahami bukan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung ketepatan sasaran program, peningkatan akses pendidikan, dan perencanaan pembangunan manusia di daerah.

Gambar 2.
Hierarchy chart Dimensi Harapan Nvivo

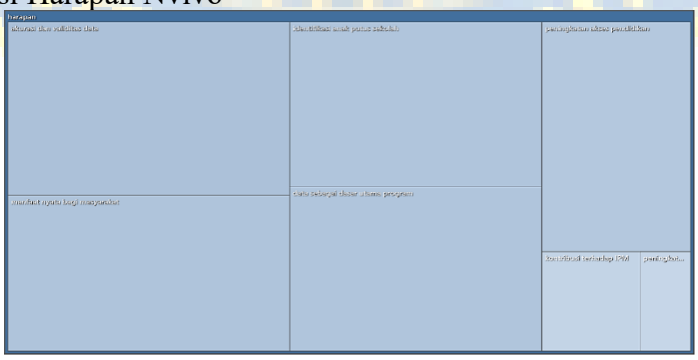

Sumber: Hasil olahan data NVivo peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 2. hierarchy chart menunjukkan bahwa harapan terhadap pemanfaatan data kependudukan berpusat pada peningkatan akurasi dan validitas data sebagai dasar identifikasi

anak putus sekolah. Harapan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mendukung peningkatan IPM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan memandang data kependudukan sebagai unsur penting dalam mendukung pelaksanaan Gerlimas. Informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa data kependudukan harus dijadikan dasar utama dalam pelaksanaan program agar sasaran yang disentuh benar-benar tepat.

Pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada wawancara tanggal 19 Januari 2026 menyatakan:

> "I1 Kalau dari kami di Disdukcapil, tentu harapan utamanya itu data kependudukan bisa betul-betul dijadikan dasar dalam pelaksanaan program ini. Karena sebenarnya data itu kan fondasi awal untuk melihat siapa sasaran yang memang harus disentuh oleh program. Jadi jangan sampai program berjalan, tapi basis datanya tidak jelas."

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ekspektasi kuat agar data kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen awal intervensi pendidikan melalui Program Gerakan Lisu Massikola. Dalam teori peran Biddle, kondisi ini menunjukkan adanya role expectation terhadap fungsi data kependudukan sebagai dasar utama intervensi program. Temuan berikutnya menunjukkan adanya harapan terhadap integrasi data antarinstansi. Informan menilai sinkronisasi antara data Disdukcapil dan data pendidikan penting untuk menghasilkan sasaran program yang lebih akurat. Dalam perspektif teori peran, kondisi ini mencerminkan perluasan role expectation yang menuntut koordinasi lintas peran antarinstansi.

Selain itu, data kependudukan juga diharapkan mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti. Informan dari Bappeda menilai data kependudukan membantu pemerintah daerah memetakan sasaran, lokasi, dan kondisi masyarakat yang membutuhkan intervensi pendidikan. Harapan lain yang muncul ialah agar pemanfaatan data kependudukan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang belum terjangkau pendidikan formal. Data yang akurat dipandang mampu membantu pemerintah menjangkau kelompok rentan akibat faktor ekonomi, jarak, dan keterbatasan akses pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan beberapa pola yang konsisten, yaitu:

a. Data kependudukan harus menjadi dasar program, bukan sekadar dokumen administratif.
b. Data kependudukan membantu identifikasi anak putus sekolah secara lebih akurat.
c. Akurasi dan validitas data sangat menentukan keberhasilan program.
d. Data kependudukan mendukung pembangunan manusia melalui peningkatan akses pendidikan.

Temuan ini diperkuat melalui observasi proses penentuan sasaran program yang menunjukkan bahwa data kependudukan telah digunakan sebagai dasar identifikasi awal anak usia sekolah, meskipun masih terdapat perbedaan dengan kondisi lapangan. Dokumentasi berupa data by name by address juga menunjukkan bahwa data kependudukan telah menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan Gerlimas. Berdasarkan temuan tersebut, dimensi harapan menunjukkan bahwa data kependudukan dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung efektivitas Gerlimas. Dalam perspektif teori peran Biddle, tingginya harapan tersebut mencerminkan kuatnya role expectation yang dibebankan kepada data kependudukan dan institusi pengelolanya, mencakup ketepatan sasaran, integrasi antarinstansi, dan dukungan terhadap perencanaan pembangunan berbasis data.

3.1.2 Norma (Norm)

Dalam penelitian ini, dimensi norma (norm) digunakan untuk melihat sejauh mana pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) di Kabupaten Bone didasarkan pada aturan, pedoman, prosedur, dan pola kerja kelembagaan yang jelas. Norma dalam penelitian ini merujuk pada kerangka regulasi di bidang administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Gambar 3.
Hierarchy chart Dimensi Norma Nvivo

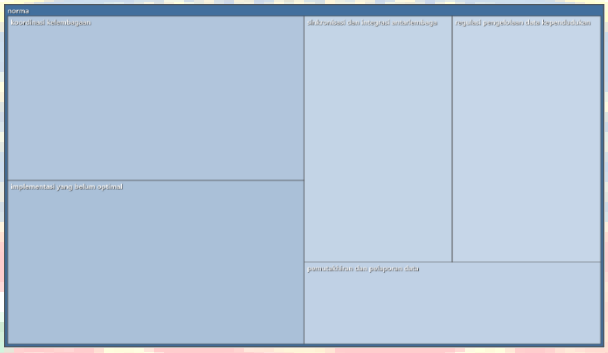

Sumber: Hasil olahan data NVivo peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 3. hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Gerlimas telah memiliki dasar normatif yang cukup jelas. Namun, kendala utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada konsistensi implementasi teknis di lapangan, terutama dalam aspek pemutakhiran dan pelaporan data. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan telah didukung oleh landasan hukum dan kebijakan yang memadai. Informan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa penggunaan data kependudukan telah memiliki dasar regulasi mulai dari peraturan perundang-undangan hingga ketentuan di tingkat daerah. Informan dari Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa pelaksanaan Gerlimas telah berjalan sesuai koridor aturan dan pedoman operasional yang tersedia.

Dalam teori peran Biddle, kondisi ini menunjukkan bahwa role norm telah terbentuk secara formal melalui regulasi dan pedoman kelembagaan. Norma tersebut berfungsi sebagai acuan perilaku bagi setiap aktor dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terdapat kekosongan aturan dalam pelaksanaan program. Temuan berikutnya berkaitan dengan prosedur pemutakhiran dan pelaporan data. Informan dari bidang teknis Disdukcapil menjelaskan bahwa mekanisme pemutakhiran data telah tersusun secara berjenjang mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Pernyataan Kabid PIAK Disdukcapil Kabupaten Bone pada wawancara tanggal 19 Januari 2026 menyatakan:

> “Kalau secara teknis sebenarnya sistemnya sudah ada dan memang sudah dirancang untuk berjalan secara berkala. Jadi pembaruan data itu tidak dilakukan sembarangan, tetapi ada alurnya. Mulai dari operator di desa atau kelurahan, lalu naik ke kecamatan, kemudian masuk ke Disdukcapil di tingkat kabupaten.”

Dalam perspektif teori peran, keberadaan prosedur berjenjang tersebut menunjukkan bahwa norma tidak hanya hadir dalam bentuk aturan umum, tetapi juga dalam bentuk mekanisme operasional yang mengatur bagaimana peran dijalankan secara teknis. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan norma masih menghadapi kendala teknis. Informan menyoroti

keterlambatan pelaporan dari tingkat bawah, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta belum konsistennya penerapan standar operasional di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan prosedur formal belum sepenuhnya menjamin data yang tersedia selalu mutakhir, akurat, dan siap digunakan.

Dalam analisis teori peran, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara role norm dan role performance. Meskipun norma telah ditetapkan secara jelas, pelaksanaan peran oleh aktor di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan standar yang diharapkan. Temuan lainnya berkaitan dengan koordinasi kelembagaan. Informan dari Bappeda menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki ruang koordinasi melalui rapat lintas sektor, pembentukan tim, dan pola kerja sama antarperangkat daerah. Namun koordinasi tersebut dinilai belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma integrasi data di tingkat daerah masih menghadapi kendala koordinatif dan teknis.

Jika dikaitkan dengan kerangka regulasi, kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi antarinstansi. Selain itu, prinsip keterpaduan data juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang menekankan standar, interoperabilitas, dan koordinasi dalam pengelolaan data pemerintah. Berdasarkan keseluruhan temuan, dimensi norma menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Gerlimas di Kabupaten Bone secara formal telah memiliki fondasi yang kuat. Akan tetapi, efektivitas norma masih ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan, khususnya dalam pemutakhiran data, sinkronisasi antarinstansi, konsistensi pelaksanaan prosedur, dan keberlanjutan koordinasi kelembagaan.

Temuan tersebut diperkuat melalui observasi terhadap proses pelayanan administrasi kependudukan dan pemutakhiran data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan telah mengacu pada prosedur yang berlaku, namun belum sepenuhnya konsisten. Hal ini juga didukung dokumentasi berupa regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang secara formal mengatur pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan. Dalam perspektif teori peran dari Biddle, kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan role norm yang kuat belum tentu menghasilkan pelaksanaan peran yang optimal apabila tidak diikuti dengan konsistensi implementasi. Oleh karena itu, penguatan dimensi norma memerlukan penguatan disiplin pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi administrasi agar pemanfaatan data kependudukan dapat lebih efektif dalam mendukung Gerlimas.

3.1.3 Wujud Perilaku (Performance)

Dalam penelitian ini, dimensi wujud perilaku (performance) digunakan untuk melihat bagaimana data kependudukan benar-benar dimanfaatkan dalam pelaksanaan Program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) di Kabupaten Bone. Dimensi ini berfokus pada praktik nyata di lapangan, mulai dari penyediaan data, proses pencocokan dan verifikasi, hingga koordinasi antarinstansi dalam menjadikan data kependudukan sebagai dasar pelaksanaan program.

Gambar 4.
Hierarchy chart Wujud Perilaku Nvivo

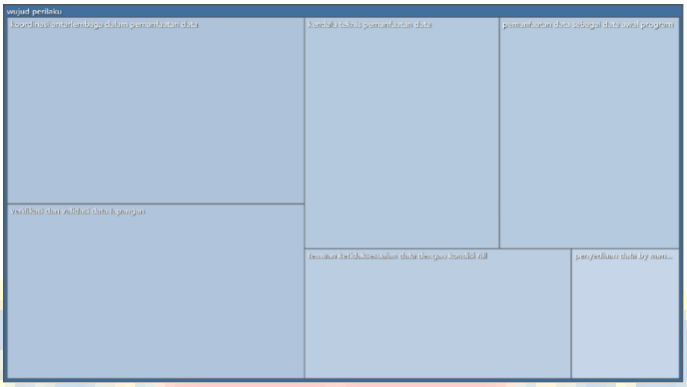

Sumber: Hasil olahan data NVivo peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 4. hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan dalam pelaksanaan Gerlimas telah diwujudkan melalui tindakan operasional, seperti penyediaan data, verifikasi lapangan, dan koordinasi lintas sektor. Namun, penggunaan data masih memerlukan proses pencocokan dan validasi agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan belum dapat dilakukan secara langsung dan sederhana karena masih membutuhkan proses verifikasi lapangan dan koordinasi lintas sektor. Observasi terhadap proses pengolahan data menunjukkan bahwa data kependudukan belum sepenuhnya dapat digunakan tanpa pengecekan ulang. Secara operasional, proses pemanfaatan data diawali dengan penyediaan data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersumber dari database berbasis NIK. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data pendidikan dan diverifikasi melalui lapangan oleh pemerintah desa atau tim pelaksana. Temuan pertama menunjukkan bahwa data kependudukan telah digunakan sebagai data awal dalam identifikasi sasaran program. Informan dari Disdukcapil menjelaskan bahwa data anak usia sekolah menjadi dasar awal untuk menelusuri anak yang belum bersekolah atau telah putus sekolah.

Dalam teori peran Biddle, kondisi ini menunjukkan bahwa role performance telah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, dimana data kependudukan telah digunakan sebagai instrumen operasional dalam pelaksanaan program. Temuan kedua menunjukkan bahwa Disdukcapil menyediakan data by name by address yang memuat identitas individu dan alamat tempat tinggal sehingga memudahkan penelusuran lapangan. Data tersebut menjadikan pelaksanaan program lebih terarah dan mendukung tindak lanjut sasaran secara konkret. Namun demikian, temuan berikutnya menunjukkan bahwa data kependudukan tidak dapat langsung digunakan tanpa verifikasi tambahan. Informan menegaskan bahwa perubahan sosial seperti perpindahan domisili, perubahan status sekolah, atau kondisi keluarga tertentu tidak selalu segera tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, verifikasi lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata.

Dalam perspektif teori peran, kondisi ini menunjukkan bahwa role performance masih memerlukan penyesuaian dengan realitas lapangan. Kebutuhan verifikasi tambahan mengindikasikan bahwa pelaksanaan peran belum sepenuhnya didukung oleh kualitas sistem data yang mutakhir. Temuan berikutnya berkaitan dengan kerja sama antarlembaga. Informan dari Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pemanfaatan data dalam Gerlimas melibatkan Disdukcapil, Dinas Pendidikan, sekolah, serta pemerintah desa atau kelurahan melalui komunikasi rutin dan forum koordinasi. Dalam teori peran, kondisi ini menunjukkan bahwa role performance bersifat kolektif dan saling bergantung antaraktor. Keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi efektivitas koordinasi dan

komunikasi antarinstansi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala teknis dan koordinatif. Informan dari Bappeda menyatakan bahwa keterlibatan banyak instansi belum otomatis menghasilkan koordinasi yang kuat dan efektif.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Kabupaten Bone pada wawancara tanggal 12 Januari 2026 mengatakan:

> "Iya, secara praktik memang ada upaya kerja bersama. Tetapi kalau bicara kualitas koordinasinya, saya kira itu masih menjadi tantangan. Karena keterlibatan banyak instansi tidak otomatis berarti koordinasinya sudah berjalan kuat dan efektif."

Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang masih tercatat dalam data ternyata telah pindah domisili atau mengalami perubahan kondisi yang belum tercatat dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan data sangat dipengaruhi kecepatan pembaruan informasi dan ketelitian verifikasi lapangan. Jika dikaitkan dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 dan kebijakan Satu Data Indonesia, pemanfaatan data kependudukan secara operasional sebenarnya telah memiliki dasar yang kuat. Namun implementasi di lapangan masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek pembaruan data dan koordinasi operasional.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dimensi wujud perilaku menunjukkan bahwa data kependudukan telah dimanfaatkan secara operasional dalam mendukung pelaksanaan Gerlimas, mulai dari identifikasi sasaran hingga penelusuran lapangan. Akan tetapi, efektivitas penggunaannya masih bergantung pada kualitas data awal, ketepatan verifikasi lapangan, serta kekuatan koordinasi antarlembaga. Dalam perspektif teori peran Biddle, pelaksanaan peran telah berjalan secara nyata namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam konsistensi, integrasi, dan akurasi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan verifikasi lapangan, percepatan pertukaran informasi, dan peningkatan koordinasi operasional agar data kependudukan dapat digunakan secara lebih akurat, mutakhir, dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

3.1.4 Evaluasi (Evaluation)

Dalam penelitian ini, dimensi evaluasi digunakan untuk menilai sejauh mana pemanfaatan data kependudukan berkontribusi terhadap pelaksanaan Program Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) di Kabupaten Bone. Evaluasi mencakup kualitas data, ketepatan sasaran, efektivitas pelaksanaan, dan relevansinya terhadap tujuan pembangunan pendidikan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis NVivo, evaluasi telah dilakukan namun belum sistematis dan belum memiliki indikator khusus terkait pemanfaatan data kependudukan.

Gambar 5.
Hierarchy chart Dimensi Evaluasi (Nvivo)

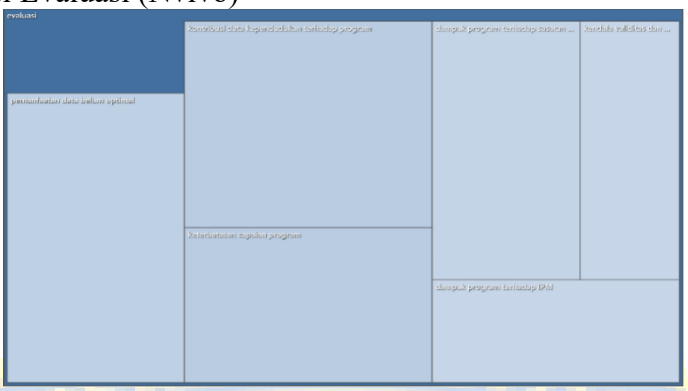

Sumber : Hasil olahan data NVivo peneliti, 2026

Berdasarkan gambar 5. hierarchy chart menunjukkan bahwa kontribusi data kependudukan menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan Gerlimas, namun belum optimal karena masih terdapat kendala validitas data dan keterbatasan capaian program. Dampak program terlihat pada tingkat sasaran, tetapi belum signifikan terhadap indikator yang lebih luas seperti IPM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa data kependudukan membantu identifikasi awal anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah sehingga mendukung ketepatan sasaran program. Observasi terhadap koordinasi lintas sektor memperlihatkan evaluasi dilakukan melalui pencocokan data dan diskusi antarinstansi, sedangkan dokumentasi berupa notulen rapat dan laporan monitoring menunjukkan evaluasi telah dilakukan secara berkala meskipun belum berbasis sistem data terintegrasi.

Temuan penelitian menunjukkan:

a. Data kependudukan mempermudah identifikasi awal sasaran program dan mendukung efektivitas tahap awal Gerlimas.
b. Pemanfaatan data belum optimal karena masih terdapat persoalan akurasi, validitas, dan kemutakhiran data.
c. Data kependudukan berdampak positif terhadap penjangkauan anak sasaran dan peningkatan peluang partisipasi pendidikan.
d. Dampak program belum signifikan terhadap indikator makro seperti IPM karena IPM dipengaruhi banyak sektor dan memerlukan waktu jangka panjang.
e. Keberhasilan program juga dipengaruhi faktor sosial seperti ekonomi keluarga, anak bekerja, dan kondisi lingkungan.

Berdasarkan teori peran Biddle, evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara role expectation dan role performance. Data kependudukan telah memberikan kontribusi nyata, tetapi belum sepenuhnya memenuhi harapan karena keterbatasan kualitas data dan belum adanya sistem evaluasi berbasis indikator kinerja. Pemanfaatan data kependudukan dinilai cukup efektif, tetapi belum optimal sehingga diperlukan penguatan kualitas data, integrasi lintas sektor, dan pendekatan intervensi yang lebih komprehensif.

3.1.5 Sanksi (Sanction)

Dimensi sanksi digunakan untuk melihat bagaimana tindak lanjut, koreksi, pembinaan, dan konsekuensi kelembagaan diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung Gerlimas di Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan

analisis NVivo, mekanisme pengendalian lebih banyak dilakukan melalui pembinaan, klarifikasi, koreksi administratif, dan perbaikan teknis dibandingkan sanksi tegas atau represif.

Gambar 6.

Hierarchy chart Dimensi Sanksi (Nvivo)



Berdasarkan gambar 6. hierarchy chart menunjukkan bahwa pengendalian pengelolaan data dilakukan melalui pembinaan, koreksi administratif, koordinasi ulang, dan evaluasi berkala. Namun efektivitasnya belum optimal karena belum adanya sanksi tegas yang mengikat sehingga disiplin pengelolaan data masih rendah. Hasil wawancara menunjukkan mekanisme sanksi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pembinaan, klarifikasi, koreksi administratif, dan perbaikan teknis dibandingkan sanksi represif. Observasi juga menunjukkan tindak lanjut kesalahan data lebih banyak dilakukan melalui pembinaan dan perbaikan sistem.

Temuan penelitian menunjukkan kesalahan data biasanya ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan perbaikan agar kualitas basis data tetap terjaga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan pendekatan yang dilakukan lebih menekankan koordinasi, pembinaan, dan perbaikan ketika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian data. Pada level operasional, konsekuensi lebih bersifat korektif daripada punitif. Fokus utama lembaga adalah memperbaiki sistem kerja, menelusuri sumber kesalahan, dan mencegah pengulangan masalah. Berdasarkan teori peran Biddle, mekanisme sanction berfungsi sebagai alat pengendalian agar role performance tetap sesuai norma organisasi.

Namun pendekatan yang terlalu bertumpu pada pembinaan juga memiliki kelemahan karena belum mampu membangun disiplin dan komitmen lintas sektor secara kuat. Informan dari Bappeda menilai belum adanya konsekuensi tegas menyebabkan sinkronisasi, pelaporan, dan pemutakhiran data belum berjalan konsisten. Secara keseluruhan, dimensi sanksi menunjukkan tata kelola data kependudukan lebih menekankan pembinaan dan perbaikan sistem dibanding penegakan sanksi formal. Pendekatan ini adaptif dan mendukung penyelesaian masalah secara cepat, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam memperkuat kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan peran.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis sebagai basis pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola (Gerlimas) dalam meningkatkan akses pendidikan dan mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bone. Data kependudukan digunakan untuk mengidentifikasi anak usia sekolah, memetakan anak putus sekolah, serta menentukan sasaran intervensi pendidikan secara lebih tepat. Temuan ini sejalan dengan Runtu (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan data administrasi kependudukan dapat mendukung integrasi layanan publik dan meningkatkan akurasi identifikasi sasaran kebijakan, penelitian ini membuktikan bahwa akurasi dan pemutakhiran data kependudukan sangat menentukan efektivitas perencanaan program pemerintah berbasis penduduk Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan

Kasbijanto et al. (2025) yang menyatakan bahwa integrasi data menjadi dasar penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik, termasuk pada sektor pendidikan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus mengaitkan pemanfaatan data kependudukan dengan implementasi program penanganan anak putus sekolah melalui Gerakan Lisu Massikola di Kabupaten Bone.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan Gerakan Lisu Massikola tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan data kependudukan, tetapi juga oleh koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah daerah. Efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh penataan kelembagaan dan koordinasi antarorganisasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik (Thaha, 2015). Pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Dinas Pendidikan berperan aktif dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data anak putus sekolah. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fadhil dan Ilham (2019) bahwa pemanfaatan data kependudukan berperan penting dalam mendukung pelaksanaan program pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa integrasi data antarinstansi masih belum optimal akibat adanya perbedaan data lapangan, keterlambatan pembaruan data, dan lemahnya sinkronisasi sistem informasi Berbeda dengan Runtu (2021) yang lebih menekankan aspek integrasi pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam mewujudkan *single identity number*, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama justru terletak pada lemahnya koordinasi kelembagaan dan integrasi data antarorganisasi pemerintah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa Gerakan Lisu Massikola memberikan dampak positif terhadap penurunan angka anak putus sekolah dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bone. Data menunjukkan bahwa jumlah anak putus sekolah mengalami penurunan dari 17.771 anak pada tahun 2021 menjadi 12.771 anak pada tahun 2024. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa integrasi administrasi kependudukan dan kebijakan pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan pentingnya data kependudukan dalam pembangunan daerah, penelitian ini menunjukkan bahwa data kependudukan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang berdampak langsung pada peningkatan akses pendidikan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pemutakhiran data, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung Gerakan Lisu Massikola dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa faktor penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan data kependudukan pada Gerakan Lisu Massikola di Kabupaten Bone, yaitu masih rendahnya akurasi dan sinkronisasi data antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan anak putus sekolah belum berjalan maksimal. Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung yang membantu pelaksanaan program, seperti adanya kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pendidikan, dukungan pemerintah daerah melalui program Gerakan Lisu Massikola, serta pemanfaatan data kependudukan

sebagai dasar penentuan sasaran program pendidikan. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa data kependudukan memiliki peran penting sebagai basis pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone, khususnya pada dimensi pendidikan. Data kependudukan digunakan sebagai dasar penentuan sasaran anak putus sekolah sehingga membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pendidikan yang lebih tepat sasaran. Namun, pemanfaatan data tersebut belum berjalan optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian data, keterlambatan pemutakhiran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Faktor penghambat integrasi data kependudukan dengan program pendidikan meliputi rendahnya akurasi data, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pendidikan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan sanksi. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi melalui penguatan pemutakhiran data, integrasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sosialisasi dan pengendalian data agar pelaksanaan Gerakan Lisu Massikola dapat lebih efektif dalam mendukung peningkatan IPM di Kabupaten Bone.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Bone dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tujuh informan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada peran data kependudukan dalam program Gerakan Lisu Massikola pada dimensi pendidikan IPM.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada wilayah lain dengan metode yang lebih luas, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, guna mengetahui efektivitas integrasi data kependudukan terhadap peningkatan pendidikan dan IPM secara lebih mendalam. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji integrasi data lintas sektor dan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung program pendidikan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan data dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2019). Evaluasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Wajo. *Jurnal Sosio Sains, 5*(2), 115–127. https://media.neliti.com/media/publications/492210-none-a6458d1c.pdf

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. *Annual Review of Sociology, 12*, 67–92. https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000435

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Darwin, M. (2016). How participation shapes local development. Populasi, 24(2), 37–66. https://doi.org/10.22146/jp.27229

Fadhil, M., & Ilham, M. (2019). Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalisasi pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Jurnal Registratie, 1(1), 1–20. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/827/520

Febriana, M., & Rangkuti, M. R. (2023). Koordinasi dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kabupaten Deli Serdang. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, *14*(2),173–187. https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/407/136

Gil-Garcia, J. R., Chun, S. A., & Janssen, M. (2009). Government information sharing and integration: Combining the social and the technical. *Information Polity*, *14*(1–2), 1–10. https://doi.org/10.3233/IP-2009-0176

Giroth, L. G. J., Purnomo, K. D. M., Dotulong, F., Mokoginta, D., & Pusung, P. H. (2024). Konsep, Urgensi dan Strategi Pembangunan Literasi Digital. *Journal of Digital Literacy and Volunteering*, *2*(2), 83–90. https://journal.artika.id/index.php/ict/article/view/105/77

Hutasoit, I. (2023). Population Growth in Batam Municipality As the Frontier and Outermost Region At the Border Between Indonesia-Singapore-Malaysia. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, *12*(2), 165–176. https://e-journal.unair.ac.id/JBK/article/view/33115/26601

Kasbijanto, K., Haq, M. S., Amalia, K., & Hazin, M. (2025). Policy analysis of the integration between Dapodik and the online student admission system in Bojonegoro Regency. *International Journal of Educational Evaluation and Policy Analysis, 2*(4), 69–77. https://www.researchgate.net/publication/396618454_Policy_Analysis_of_the_Integration_between_Dapodik_and_the_Online_Student_Admission_System_in_Bojonegoro_Regency

Khairina, N., & Wijaya, A. (2023). The determinant of human development in Eastern Part of Indonesia during 2012–2020. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 12(1), 83–96. https://journal.uinjkt.ac.id/signifikan/article/view/29496/13660

Khairul Muluk, M. R., & Wahyudi, L. E. (2022). Key Success in Fostering Human Development Index at the Local Level. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *12*(2), 128–141. https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7665

Melo, R. H., Lasulika, C. T., & Saleh, S. E. (2024). Optimalisasi Bonus Demografi Melalui Kebijakan Kependudukan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *GeoJPG: Jurnal Penelitian Geografi*, *3*(2), 143–148. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/geojpg/article/view/29538/9906

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.

Rahadi, D. R., Marbun, S. O., & Muslih, M. (2020). Tata kelola pemerintahan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA) 2019*. https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/143/pdf

Rahmah, M., Amelia, R., Hamdi, M., & Sri Rahayu, A. Y. (2025). Adaptive-Comprehensive Policy: Levers of Long-Term Human Development in Local Government. *Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, *13*(2), 159–175. https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/85660/24810

Runtu, M. R. G. (2021). Integrasi Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Mewujudkan Single Identity Number. *Amsir Management Journal*, *1*(2), 53–60. https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/amj/article/view/959/607

Saputra, D. A., Ardila, L. N., Siddi, P., & Sutopo, B. (2018). Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local governments in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *22*(2), 94–104. https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11284/8794

Saragih, A. H. (2018). An Analysis of Local Taxes Revenue's Effect on Human Development Index. *Jurnal Economia*, *14*(2), 197–211. https://journal.uny.ac.id/index.php/economia/article/view/21595/pdf

Sedarmayanti. (2017). *Manajemen sumber daya manusia reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil*. Refika Aditama.

Siswidiyanto, & Sahputri, R. A. M. (2023). Decentralisation and Human Development in Indonesia: The Importance of Local Government Capacity in Delivering Development Outputs and Outcomes. *Lex Localis*, *21*(2), 393–419. http://lex-localis.org/index.php/LexLocalis/article/view/2028

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukur, M., & Listiyono, H. (2014). Rekayasa sistem informasi demografi sebagai dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. *Dinamik, 19*(1). https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti1/article/view/4088

Sunardi, S., Djazuli, A., Handayani, S. R., Hidayat, R. R., & Saksono, H. (2022). The role of human development in improving local government performance through good government governance. Jurnal Bina Praja, 14(3), 571–582. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/1461/593

Thaha, R. (2015). Penataan kelembagaan pemerintahan daerah. GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 69–78. https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/1132

Thoits, P. A. (2013). Self, Identity, Stress, and Mental Health. In Handbooks of Sociology and Social Research (pp. 357–377). https://doi.org/10.1007/978-94-007-4276-5_18

Widodo, S., & Utami, R. (2023). *Metodologi penelitian pendidikan dan bisnis*. Mitra Wacana Media.

Yin, R., Lepinteur, A., Clark, A. E., & D'Ambrosio, C. (2023). Life Satisfaction and the Human Development Index Across the World. Journal of Cross-Cultural Psychology, 54(2), 119–141. https://doi.org/10.1177/00220221211044784